



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

---

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Jl. Sunan Muria No. 9 Kode Pos 59313 Kudus  
Telp. (0291) 438713  
E-mail : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang disertai dengan proses koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang lain.

Diharapkan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023, dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Kudus.

Kudus, September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA



**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I   PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Maksud dan Tujuan.....	2
1.3   Landasan Hukum .....	2
1.4   Sistematika .....	4
<b>BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT           DAERAH .....</b>	 <b>5</b>
2.1   Aalisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	5
2.2   Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	 7
2.3   Ealuasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023 s/d Triwulan II .....	 26
2.4.   Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangka Daerah .....	 38
<b>BAB III  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA           PERUBAHAN DAERAH .....</b>	 <b>41</b>
<b>BAB IV  PENUTUP .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 ..... 7
Tabel 2.3	Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II ..... 27
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo ..... 42
Tabel 3.2	Rumusan Indikator Program Dinas Kominfo ..... 43
Tabel 3.3	Rumusan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kominfo ..... 43
Tabel 3.4	Rekapitulasi Perubahan Anggaran Renja Tahun 2023 ..... 47
Tabel 3.5	Rumusan Perubahan Rencana Rencana Kerja dan Pendanaan Perangaka Daerah Tahun 2023 Dinas Kominfo..... 48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja OPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan yang merupakan hasil evaluasi pada pencapaian pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen ini diperlukan untuk mengakselerasi apaian sasaran pembangunan urusan pertanian pangan dan perikanan selama tahun 2023 dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja Perubahan adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah :

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta program kegiatan yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD.
- c. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/ mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- d. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang belum sesuai dengan perkembangan. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Inforatika Kabupaten Kudus didasakan pada pertimbangan hal –hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian pagu gaji Pegawai Negeri Sipl (PNS) sesuai dengan jumlah PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa silpa DBHCHT tahun sebelumnya dialokasikan kembali pada anggaran perubahan tahun berjalan sehingga berdampak pada perubahan anggaran dan perubahan target capaian kinerja.
3. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus mengamanatkan penataan kembali kelembagaan Radio Suara Kudus sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang independen sehingga perlu diadakan seleksi pengisian Dewan Pengawas Radio Suara Kudus.
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur SPBE maka perlu pemasangan jaringan Fiber Optic diseluruh wilayah Kabupaten kudus sehingga diperlukan dokumen perencanaan pemasangan jaringan fiber optic.
5. Perumbuhan dan perkembangan pasar menyebabkan sebagian barang dengan spesifikasi tertentu sudah tidak diproduksi lagi dan mengalami kenaikan harga di pasaran sehinga perlu perubahan barang yang masih tersedia di pasar.

#### **1.4. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 62).



16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 25.

### **1.5. Sistematika**

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai berikut :

Bab I.       PENDAHULUAN

Bab ini memuat/ menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan.

Bab II       EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRWULAN II TAHUN 2023

Bab ini memuat evaluasi Renja hingga Triwulan II Tahun 2023.

Bab III.     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat usulan dan revisi program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan.

BAB IV      PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran atau hal penting yang perlu mendapat perhatian penting dalam Perubahan Renja Tahun 2023.

## BAB II

### EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023





#### 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah ditetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja. Indikator indikator yang mengacu pada sasaran RPJMD tahun 2018-2023 dan analisis pencapaian sampai dengan triwulan II dari Dinas Komunikasi dan Informatika lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :




##### a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018- 2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48%	48		Dinas Kominfo
2.	Kebijakan internal SPBE	3,06	1,94	3,12	2,30	3,90	3,06	3,9	127,45		Dinas Kominfo
3.	Tata kelola SPBE	2,43	1,43	2,43	1,90	3,00	2,43	3	123,46		Dinas Kominfo
4.	Layanan SPBE	3,03	2,55	3,39	3,49	3,82	3,03	3,82	126,07		Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat kinerja											

Keterangan :

 : Tercapai lebih dari 100%  : Akan tercapai (20 % ≤ 99%)  : Perlu Upaya Keras (< 20%)  
Sangat Tinggi  $X \geq 46$ ; Tinggi  $45 \geq X > 38$ ; Sedang  $37 \geq X > 33$ ; Rendah  $32 \geq X > 26$ ; Sangat Rendah  $X \leq 25$

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada indikator Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media masih 40%. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah strategis

guna mencapai target 100% yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun langkah strategis tersebut adalah:

- Memobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki OPD untuk segera menyelesaikan program kegiatan yang sudah dan masih berjalan sampai triwulan II agar beban kerja dari target yang ada di triwulan berikutnya maupun program kegiatan triwulan sebelumnya yang belum terlaksana dapat di-manage dengan baik;
- Konsolidasi internal, yakni dengan mengadakan evaluasi internal untuk mendeteksi permasalahan dan melihat program dan kegiatan mana saja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga diperlukan perhatian khusus guna menjamin keberhasilan realisasi program kegiatan tersebut;
- Melakukan perencanaan ulang bagi program kegiatan yang belum terlaksana (baik yang dijadwalkan pada triwulan I dan II, mau pun yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV), khususnya terkait dengan penganggaran pada anggaran perubahan tahun ini;
- Melanjutkan koordinasi dengan para stakeholder, terkait dengan program kegiatan yang perlu terlaksana untuk memastikan program kegiatan tersebut nantinya dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Melakukan evaluasi rutin terkait progres atas realisasi program kegiatan tersebut guna mengantisipasi adanya hambatan yang dapat timbul dalam pelaksanaannya.

Faktor pendorong tercapai lebih dari 100% dikarenakan kemudahan koordinasi dengan perangkat daerah serta telah diterbitkannya regulasi dan pedoman evaluasi SPBE yang jelas pada masing-masing indikator penilaian membuat indeks SPBE dapat menacapai target.

#### b. Urusan Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada table berikut:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018- 2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIV	STATISTIK										
1.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	0	0	▼	Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat kinerja											

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100%    ► : Akan tercapai (20 % ≤ 99%)    ▼ : Perlu Upaya Keras (< 20%)  
Sangat Tinggi  $X \geq 46$ ; Tinggi  $45 \geq X > 38$ ; Sedang  $37 \geq X > 33$ ; Rendah  $32 \geq X > 26$ ; Sangat Rendah  $X \leq 25$

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi target sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 masih 0%. Hal ini dikarenakan sulitnya dalam pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing OPD.

Upaya yang akan dilakukan yaitu menyelenggarakan Forum Satu Data Kabupaten Kudus sekaligus mensosialisasikan Peraturan Bupati Kudus nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus, yang di dalamnya disebutkan bahwa setiap Perangkat adalah Produsen Data merangkap sebagai walidata pendukung. Tugas Produsen data adalah menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Kab. Kudus, serta menyampaikan data kepala walidata (Dinas Kominfo) beserta metadata yang melekat pada Data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan walidata pendukung adalah sekretaris/pejabat administrator yang membidangi kesekretariatan pada perangkat daerah, di mana salah satu tugasnya adalah memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang disampaikan oleh produsean data. Forum Satu Data Kabupaten Kudus rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III.

#### c. Urusan Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Aspek/ Program Indikator Kinerja	Target RPJMD 2018- 2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian RKPD 2023 sd TW II (%)	Status	PD Penanggung Jawab
							Target	Realisasi sd TW II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV	PERSANDIAN										
1.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	24%	9%	44%	12%	82%	24%	0	0	▼	Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat kinerja											

Keterangan :

● : Tercapai lebih dari 100%    ▲ : Akan tercapai (20 % ≤ 99%)    ▼ : Perlu Upaya Keras (< 20%)  
Sangat Tinggi  $X \geq 46$ ; Tinggi  $45 \geq X > 38$ ; Sedang  $37 \geq X > 33$ ; Rendah  $32 \geq X > 26$ ; Sangat Rendah  $X \leq 25$

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan memberikan pelatihan kepada personal yang sudah ada terkait keamanan informasi, serta membentuk tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sebagai Upaya tanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Serta akan dibangun SOC (*Security Operation Center*) yang berfungsi untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespon insiden keamanan siber. Sehingga jika suatu terpantau trafik penggunaan system yang tidak semestinya, maka dapat ditindaklanjuti secepat mungkin.

### 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil diwujudkan sampai dengan Triwulan II. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam pelaksanaan diperlukan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PERIODE PELAKSANAAN : 2023**  
**TRIWULAN II**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
				I		II		III		IV					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8	10=9/4*100	11	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			16,544,684		3,635,205		5,424,181		0		0		9,059,387		54.76
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	84 Indeks		87.17	87.73			0	0			87.73		104.44	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	84 Indeks		87.17	87.73			0	0			87.73		104.44	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			6,992		1,854		1,006		0		0		2,860		40.9
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	11 Dokumen		6	1			0	0			7		63.64	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1,100		574		226		0		0		800		72.68
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		4	0			0	0			4		50	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,892		1,280		780		0		0		2,060		34.96
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3	0			0	0			3		100	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			3,889,827		457,555		1,254,343		0		0		1,711,898		44.01

	<b>Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>50</b>						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,788,302	444,989	1,242,407	0	0	1,687,396	44.54					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	23	1	0	0	24	92.31						
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			85,860	8,560	8,700	0	0	17,260	20.1					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3	3	0	0	6	50						
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15,665	4,007	3,236	0	0	7,242	46.23					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3	3	0	0	6	50						
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>5,874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,874</b>	<b>97.9</b>					
	<b>Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>						
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6,000	0	5,874	0	0	5,874	97.9					
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	0	0	0	1	100						
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>8,711,855</b>	<b>2,805,542</b>	<b>3,317,543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,123,085</b>	<b>70.28</b>					
	<b>Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			61,855	0	0	0	0	0	0					
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0	0	0	0	0	0	0					
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			8,650,000	2,805,542	3,317,543	0	0	6,123,085	70.79					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	10800 orang	3200	5800	0	0	9000	83.33						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>260,558</b>	<b>47,966</b>	<b>47,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,751</b>	<b>36.75</b>					
	<b>Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar</b>	<b>100 %</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>						



Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53,218		7,301		9,181		0		0		16,482		30.97
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		9		11		0		0		20		50	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35,363		8,556		4,826		0		0		13,382		37.84
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0.25		0.25		0		0		0.5		50	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20,162		1,221		1,514		0		0		2,735		13.57
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		1		1		0		0		2		28.57	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10,800		2,610		2,610		0		0		5,220		48.33
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3		3		0		0		6		50	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141,015		28,278		29,654		0		0		57,932		41.08
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		3		0		0		6		50	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>67,010</b>		<b>33,200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>33,200</b>		<b>49.54</b>
	<b>Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)</b>	<b>13 Unit</b>		<b>9</b>		<b>-9</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Pengadaan Mebel			15,860		0		0		0		0		0		0
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit		0		0		0		0		0		0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51,150		33,200		0		0		0		33,200		64.91
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9		-9		0		0		0		0	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,285,803</b>		<b>213,252</b>		<b>754,443</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>967,694</b>		<b>29.45</b>
	<b>Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan</b>	<b>12 Laporan</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6</b>		<b>50</b>	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,500		641		234		0		0		874		24.97
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		1		1		0		0		2		50	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3,282,303		212,611		754,209		0		0		966,820		29.46
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3		0		0		6		50	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>316,639</b>		<b>75,836</b>		<b>43,189</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>119,024</b>		<b>37.59</b>
	<b>Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar</b>	<b>21 Unit</b>		<b>7</b>		<b>6</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>13</b>		<b>61.9</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			267,456		67,901		37,944		0		0		105,844		39.57
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		5		3		0		0		8		66.67	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			49,183		7,935		5,245		0		0		13,180		26.8
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		7		26		0		0		33		47.14	
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			<b>8,027,306</b>		<b>3,645,510</b>		<b>2,838,725</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6,484,235</b>		<b>80.78</b>
	<b>Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media</b>	<b>100 %</b>		<b>24</b>		<b>48</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>48</b>		<b>48</b>	
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>8,027,306</b>		<b>3,645,510</b>		<b>2,838,725</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6,484,235</b>		<b>80.78</b>
	<b>Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten</b>	<b>72 %</b>		<b>20</b>		<b>16</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>36</b>		<b>50</b>	
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			186,500		700		600		0		0		1,300		0.7

	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0				
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			313,200		73,554		66,294		0	0		139,848		44.65	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	200 Dokumen		139		119		0	0		258		129		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			7,042,977		3,559,091		2,757,733		0	0		6,316,824		89.69	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	204 Dokumen		112		61		0	0		173		84.8		
Pelayanan Informasi Publik			75,677		12,166		12,298		0	0		24,464		32.33	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	20 Dokumen		3		3		0	0		6		30		
Layanan Hubungan Media			188,265		0		1,800		0	0		1,800		0.96	Kegiatan bertepatan dengan kegiatan sosialisasi DBHCHT
	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan		0		0		0	0		0		0		
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			50,000		0		0		0	0		0		0	Kegiatan telah terlaksana sebagian, sisa kegiatan menunggu pengumuman hasil lombaFK Metra
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen		0		0		0	0		0		0		
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik			170,688		0		0		0	0		0		0	
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															

	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit		0		0		0		0		0		0
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>2,050,484</b>		<b>281,928</b>		<b>967,762</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,249,690</b>		<b>60.95</b>
	<b>Indeks SPBE</b>	<b>2 Indeks</b>		<b>3.38</b>		<b>3.38</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.38</b>		<b>169</b>	
	<b>Kebijakan Internal SPBE</b>	<b>3 Indeks</b>		<b>3.9</b>		<b>3.9</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.9</b>		<b>130</b>	
	<b>Layanan SPBE</b>	<b>3 Indeks</b>		<b>3.82</b>		<b>3.82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3.82</b>		<b>127.33</b>	
	<b>Tata Kelola SPBE</b>	<b>2 Indeks</b>		<b>3</b>		<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3</b>		<b>150</b>	
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,371,012</b>		<b>53,109</b>		<b>870,599</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>923,708</b>		<b>67.37</b>
	<b>Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan</b>	<b>209 Unit</b>		<b>12</b>		<b>48</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60</b>		<b>28.71</b>	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1,371,012		53,109		870,599		0	0		923,708		67.37
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	209 Unit		209		-149		0	0		60		28.71	
<b>Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>679,471</b>		<b>228,819</b>		<b>97,163</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>325,981</b>		<b>47.98</b>
	<b>Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data</b>	<b>127 Unit</b>		<b>90</b>		<b>37</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>127</b>		<b>100</b>	
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			172,767		142,333		1,210		0	0		143,543		83.08
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit		1		0		0	0		1		100	
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			134,591		0		9,641		0	0		9,641		7.16
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit		0		1		0	0		1		33.33	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			372,114		86,486		86,311		0	0		172,797		46.44

	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			<b>136,036</b>	<b>2,692</b>	<b>1,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,798</b>	<b>2.79</b>				
	<b>Cakupan pelayanan data statistik sektoral</b>	<b>100 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>			<b>136,036</b>	<b>2,692</b>	<b>1,106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,798</b>	<b>2.79</b>				
	<b>Jumlah dokumen statistik sektoral</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			120,023	0	806	0	0	806	0.67				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen		0	0	0	0	0	0				
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			16,013	2,692	300	0	0	2,992	18.69				
	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200 Orang		0	0	0	0	0	0				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			<b>52,033</b>	<b>4,184</b>	<b>1,944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,128</b>	<b>11.78</b>				
	<b>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian</b>	<b>24 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			<b>52,033</b>	<b>4,184</b>	<b>1,944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,128</b>	<b>11.78</b>				
	<b>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi</b>	<b>6 PD</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>					

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			34,855		4,184		1,944		0		0		6,128		17.58	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		0		0		0		0		0		0		
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			17,178		0		0		0		0		0		0	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah		0		3		0		0		3		42.86		
			26,810,543		16,803,237								16,803,237			
														<b>60.24</b>	<b>62.67</b>	
														<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	

Dari Tabel 2.4 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sampai dengan Triwulan II yaitu 60,24 dengan predikat sangat tinggi . akan tetapi masih ada beberapa kegiatan yang capaian targetnya di bawah 50%, antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan :
  - a. kegiatan Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah (0%);
  - b. kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (0%).
2. Program Aplikasi Informatika, pada kegiatan :
  - a. Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota (28,71%).
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, pada kegiatan :
  - a. kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota dengan rata-rata capaian kinerja masih 0%.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya capaian yang masih rendah antara lain sebagai berikut :

    - a. Pada kegiatan Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah dikarenakan pelaksanaan diklat teknis rata rata pada Bulan September/ Triwulan III.
    - b. kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yaitu pembelian mebelair guna pengisian ruang podcast belum dilaksanakan dikarenakan pembuatan ruang podcast belum dilaksanakan.
    - c. Pelaksanaan kegiatan Layanan Hubungan Media bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi DBHCHT sehingga pelaksanaannya ditunda dan direncanakan untuk masuk pada anggaran perubahan;
    - d. Beberapa barang yang dibutuhkan pada pembangunan jaringan fiber optik masih dalam proses pengadaan;
    - e. Ketersediaan programmer yang hanya 2 orang untuk fasilitasi perbaikan dan pembuatan aplikasi OPD mengakibatkan layanan kurang optimal;
    - f. Arsitektur nasional yang ditetapkan setelah arsitektur SPBE Kabupaten Kudus mengakibatkan perlunya penyesuaian

- dengan arsitektur SPBE nasional;
- g. Belum adanya regulasi penerapan Smart City dari pusat, sehingga daerah belum bisa Menyusun regulasi Smart City di daerah - Kesulitan dalam pengumpulan data statistik sektoral pada masing-masing OPD;
  - h. Kurangnya tenaga keamanan informasi sehingga tidak ada yang fokus pada pengamanan aplikasi;
  - i. Kurangnya pemahaman terkait penyusunan prosedur dan tata kelola keamanan informasi mengakibatkan nilai Indeks KAMI rendah;
  - j. Meningkatnya serangan web defacement pada beberapa portal Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - k. Kurangnya tenaga ahli programmer untuk memperbaiki serangan web defacement tersebut.

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, antara lain :

- a. Adanya komitmen dan profesionalitas dari SDM pelaksana kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana; - Adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana;
- b. Adanya sinergi lintas OPD dan instansi yang memudahkan pelaksanaan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah serta Pelayanan Informasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana;
- c. Adanya kemitraan dan sinergi yang profesional dengan rekanan media sehingga kegiatan Pengelola Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dapat terlaksana sesuai rencana;
- d. Kemudahan dalam koordinasi dengan perangkat daerah;
- e. Koordinasi intens antara Diskominfo dan FK Metra membuat pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan dapat terealisasi dengan baik;
- f. Kemudahan dalam koordinasi dengan perangkat daerah;
- g. Adanya daftar data dan metadata yang sesuai dengan permendagri 18 2020 dan permendagri 86 2017 memudahkan dalam penyusunan form permohonan data statistik sektoral;



- h. Pemanfaatan tanda tangan elektronik meningkat dengan adanya launching penggunaan aplikasi E-Pena (Elektronifikasi Pencairan Dana).

Hal yang perlu ditindaklanjuti atas kinerja pelaksanaan kegiatan yang masih kurang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah :

- a. Capaian kinerja secara rata-rata sudah tinggi, tetapi masih perlu di tingkatkan;
- b. Untuk beberapa kegiatan yang capaian kegiatan sudah ada tetapi serapan keuangan masih kosong, untuk segera dilakukan penyerapan;
- c. Kegiatan Pendidikan pelatihan pegawai berdasar tugas pokok dan fungsi capaian masih kosong, untuk dipacu pelaksanaannya;
- d. Untuk Kegiatan Layanan Hubungan Media yang rencana ditunda dan direncanakan pada perubahan anggaran untuk segera disusun perencanaan perubahannya;
- e. evaluasi faktor penghambat dalam pemenuhan target kinerja tahun ini dapat dijadikan perbaikan untuk perencanaan tahun mendatang (SDM Programmer).

#### **2.4. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Diantara isuisu strategis sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya peran Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya transparansi informasi dan desiminasi informasi Pemerintah Daerah.
- b. Penguatan peran masyarakat melalui KIM;
- c. Penguatan keterlibatan Perangkat Daerah dalam upaya membangun pengelolaan komunikasi publik;
- d. Belum adanya satu data yang terintegrasi di tingkat Kabupaten Kudus;

- e. Perangkat Daerah masih ada yang belum mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian;
- f. Perangkat Daerah masih ada yang belum memanfaatkan penggunaan sertifikat elektronik.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 fokus pada program-program kerja untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional. Untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi Indonesia Digital yang maju, hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu tidak bisa berjalan sendiri. Pergerakan harus dilakukan bersama antar seluruh perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses. Melihat alasan tersebut, Pemerintah Daerah diharuskan berperan aktif guna mewujudkan percepatan transformasi digital dikarenakan Pemerintah Daerah berhadapan langsung dengan masyarakat. Transformasi Digital meliputi :

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital ;
2. Roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis ;
3. Percepatan integrasi PDN ;
4. Penyiapan kebutuhan SDM talenta digital ;
5. Percepatan penerbitan segala regulasi .

Tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi 2 sub urusan yaitu :

- a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi komunikasi publik meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. pelayanan Informasi Publik;
- g. layanan hubungan media;

- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- i. manajemen komunikasi krisis;
- j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika meliputi :

- a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Nama Domain;
- c. Pusat Data;
- d. sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah;
- e. sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- f. keamanan informasi;
- g. data dan Informasi Elektronik;
- h. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- i. sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas;
- k. sumber daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; dan
- l. Government Chief Information Officer (GCIO).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus melaksanakan misi 2 Bupati Kudus yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik. Jumlah pengguna internet di Indonesia naik secara signifikan. Ini menjadi peluang bagi Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan transformasi digital secara cepat.

Dengan demikian, hal ini menjadi tugas bagi Dinas Kominfo untuk mampu membangun dan mengembangkan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka memberikan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Semakin pesat pertumbuhan jumlah pengguna internet berdampak negatif terhadap munculnya kejahatan cyber. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut keras untuk mampu menguatkan keamanan informasi Pemerintah Daerah dari kejahatan cyber.

Peningkatan pengguna internet juga berdampak pada kecepatan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Monitoring opini dan aspirasi publik harus dikuatkan guna menyaring berita – berita hoaks yang tersebar di masyarakat dan menguatkan berita-berita benar ke masyarakat.

### **BAB III**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Telah disajikan pada Bab sebelumnya bahwa perubahan renja Perangkat daerah dilakukan karena adanya perubahan RKPD, untuk mengakomodir dinamika perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.

Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Kudus tahun 2023.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 direncanakan antara lain untuk penyesuaian gaji PNS, tambahan alokasi DBHCHT, pelaksanaan seleksi dewan pengawas radio suara kudus, pelaksanaan penataan ruang podcast, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak, jasa konsultasi perencanaan pemasangan *fiber optic*, penyesuaian harga jasa konsultasi bidang telematika.

Secara rinci perubahan target kinerja dan penganggaran dalam Perubahan Rencana Kerja sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rekapitulasi Perubahan Anggaran  
Renja Tahun 2023

No	Program	RKPD Awal (Rp)	APBD (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14,866,596,916	16,544,684,036	21,172,129,836	- Penyesuaian gaji PNS - tambahan alokasi DBHCHT
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,211,930,000	8,027,306,200	8,045,474,400	- tambahan alokasi dana untuk pelaksanaan seleksi dewan pengawas radio suara kudus. - pergeseran untuk pelaksanaan penataan ruang podcast - tambahan untuk penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak.
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,070,384,300	2,050,483,545	2,153,691,545	- tambahan anggaran untuk jasa konsultasi perencanaan pemasangan <i>fiber optic</i> . - penyesuaian harga jasa konsultasi bidang telematika. - tambahan untuk penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak.
4	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	159,598,600	136,036,000	136,036,000	-
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	52,033,010	52,033,010	52,033,010	-
	JUMLAH	18,360,542,826	26,810,542,791	31,559,364,791	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran semula Rp. 14.866.596.916 menjadi Rp. 16.544.684.036, dengan rincian perubahan pada kegiatan:
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan anggaran semula Rp. 8.027.306.200 menjadi Rp. 8.045.474.400, dengan rincian perubahan pada kegiatan:
    - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah, Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
  3. Program Aplikasi Informatika, dengan anggaran semula Rp.2.050.483.545 menjadi Rp. 2.153.691.545, dengan rincian perubahan pada kegiatan:
    - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
    - b. Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
  4. Program Penyelenggaraan statistik sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi tidak mengalami perubahan anggaran.

Rencana Perubahan Renja PD dalam upaya mencapai target IKU sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/91/2022 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan Bupati

Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Dokumen renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>No.</b>	<b>Rumusan IKU</b>	<b>Target Awal 2022</b>	<b>Target Perubahan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.87	2.87	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81.00	81.00	
3	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	91.00	91.00	
4	Rasio ketercukupan data statistik sektoral	60.00	60.00	
5	Indeks Keamanan Inforasi (KAMI)	50.00	50.00	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa tidak ada perubahan IKU dalam perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan IKU sampai pada akhir Tahun 2023 adalah :

1. Mengoptimalkan pegawai dan sarana prasarana yang ada.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menunjang keberhasilan target kinerja yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan daerah di atas serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, maka dilaksanakan perubahan, pergeseran alokasi anggaran kegiatan melalui Perubahan APBD Tahun 2023 dengan memperhatikan sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2023, urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.



Rencana Perubahan Renja PD dalam upaya mencapai target indikator sebagaimana tertuang dalam Dokumen renstra Dinas Kominfo dan RPJMD urusan Kominfo, Statistik dan Persandian sebagaimana tertera dalam Tabel 3.3 di bawah ini :

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2	16					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									<b>18,148,911,216</b>	<b>26,622,473,781</b>	<b>31,371,295,781</b>		<b>19,631,728,336</b>				
2	16	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A</b>	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kominfo)	Indeks		Indeks	84 Indeks	84 Indeks	<b>14,866,596,916</b>	<b>16,544,684,036</b>	<b>21,172,129,836</b>			84 Indeks	<b>17,883,752,336</b>				
2	16	01	2.01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	<b>6,991,760</b>	<b>6,991,760</b>	<b>6,991,760</b>			11 Dokumen	<b>7,833,936</b>				
2	16	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	8 Dokumen	1,210,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	5,891,760	5,891,760	5,891,760	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	3 Laporan	6,623,936	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	<b>3,892,966,800</b>	<b>3,889,826,800</b>	<b>3,543,241,800</b>						12 Laporan	<b>4,033,173,800</b>	
2	16	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 orang/bulan	24 orang/bulan	3,788,302,000	3,788,302,000	3,470,097,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	24 orang/bulan	3,931,702,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	89,000,000	85,860,000	57,480,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	12 Dokumen	89,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15,664,800	15,664,800	15,664,800	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	12 Dokumen	12,471,800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.03			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi BMD sesuai standar	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>						1 Dokumen	<b>6,000,000</b>	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	1 Dokumen	6,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2 16 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	<b>7,061,854,906</b>	<b>8,711,855,026</b>	<b>13,711,855,026</b>						1 Laporan	<b>10,067,000,000</b>	
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	61,855,026	61,855,026	61,855,026	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PD dan masyarakat	3 Orang	67,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				10800 orang	12800 orang	6,999,999,880	8,650,000,000	13,650,000,000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PD dan masyarakat	12800 orang	10,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2 16 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%		%	100 %	100 %	<b>272,822,150</b>	<b>260,558,150</b>	<b>256,058,950</b>						100 %	<b>300,104,000</b>	
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	38,444,000	53,218,000	54,468,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	40 Paket	42,288,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,362,750	35,362,750	35,362,750	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	1 Paket	38,899,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	6 Paket	22,015,400	20,162,400	14,413,200	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	6 Paket	24,217,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,800,000	10,800,000	10,800,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	12 Dokumen	11,880,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	166,200,000	141,015,000	141,015,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	12 Laporan	182,820,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	Unit		Unit	13 Unit	11 Unit	<b>61,936,000</b>	<b>67,010,000</b>	<b>65,290,000</b>							11 Unit	<b>68,129,600</b>	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 unit	5 unit	10,573,000	15,860,000	15,860,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	5 unit	11,630,300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	6 Unit	51,363,000	51,150,000	49,430,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	6 Unit	56,499,300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	<b>3,272,579,200</b>	<b>3,285,803,200</b>	<b>3,285,803,200</b>							12 Laporan	<b>3,069,920,000</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	4 Laporan	3,850,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,269,079,200	3,282,303,200	3,282,303,200	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	12 Laporan	1,385,149,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	Unit		Unit	21 Unit	82 Unit	<b>291,446,100</b>	<b>316,639,100</b>	<b>296,889,100</b>							82 Unit	<b>331,591,000</b>	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	261,456,100	267,456,100	247,706,100	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	12 Unit	298,602,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	29,990,000	49,183,000	49,183,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	70 Unit	32,989,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	%	%	%	100 %	100 %	<b>2,211,930,000</b>	<b>8,027,306,200</b>	<b>8,045,474,400</b>					100 %	<b>1,099,999,000</b>		
2 16 02 2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	%	%	%	72.368 %	72.368 %	<b>2,211,930,000</b>	<b>8,027,306,200</b>	<b>8,045,474,400</b>					72.368 %	<b>1,099,999,000</b>		
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	117,500,000	186,500,000	186,500,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	5 Dokumen	129,250,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	313,200,000	313,200,000	317,328,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	200 Dokumen	35,640,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				204 Dokumen	214 Dokumen	1,350,973,000	7,042,977,200	7,057,017,400	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	214 Dokumen	566,789,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				20 Dokumen	20 Dokumen	75,676,600	75,676,600	75,676,600	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	20 Dokumen	83,244,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	188,264,700	188,264,700	188,264,700	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	2 Layanan	196,091,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	1 Dokumen	27,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	6 Unit	141,315,700	170,687,700	170,687,700	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	6 Unit	61,485,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Indeks SPBE Kebijakan Internal SPBE Layanan SPBE Tata Kelola SPBE	Indeks Indeks Indeks Indeks		Indeks Indeks Indeks Indeks	2,87 Indeks 3,06 Indeks 3,03 Indeks 2,43 Indeks	2,87 Indeks 3,06 Indeks 3,03 Indeks 2,43 Indeks	<b>1,070,384,300</b>	<b>2,050,483,545</b>	<b>2,153,691,545</b>						2,87 Indeks 3,06 Indeks 3,03 Indeks 2,43 Indeks	<b>647,977,000</b>	
2 16 03 2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan	Unit		Unit	209 Unit	209 Unit	<b>390,913,000</b>	<b>1,371,012,245</b>	<b>1,450,092,245</b>						209 Unit	<b>258,404,000</b>	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				209 Unit	209 Unit	390,913,000	1,371,012,245	1,450,092,245	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	209 Unit	258,404,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	Unit		Unit	127 Unit	127 Unit	<b>679,471,300</b>	<b>679,471,300</b>	<b>703,599,300</b>						127 Unit	<b>389,573,000</b>	
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	172,766,500	172,766,500	172,766,500	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	1 Unit	133,158,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	2 Unit	134,590,800	134,590,800	154,590,800	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	2 Unit	214,050,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	372,114,000	372,114,000	376,242,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	1 Dokumen	42,365,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>159,598,600</b>	<b>136,036,000</b>	<b>136,036,000</b>							<b>111,444,000</b>			
2 20 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	%	%		100 %	100 %	<b>159,598,600</b>	<b>136,036,000</b>	<b>136,036,000</b>							100 %	<b>111,444,000</b>	
2 20 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah dokumen statistik sektoral	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	<b>159,598,600</b>	<b>136,036,000</b>	<b>136,036,000</b>							1 Dokumen	<b>111,444,000</b>	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	143,586,000	120,023,400	120,023,400	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kudus	1 Dokumen	93,830,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				200 Orang	200 Orang	16,012,600	16,012,600	16,012,600	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kudus	200 Orang	17,614,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>52,033,010</b>	<b>52,033,010</b>	<b>52,033,010</b>							<b>57,236,000</b>			
2 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	%	%		24 %	24 %	<b>52,033,010</b>	<b>52,033,010</b>	<b>52,033,010</b>							24 %	<b>57,236,000</b>	
2 21 02 2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	PD	PD		6 PD	6 PD	<b>52,033,010</b>	<b>52,033,010</b>	<b>52,033,010</b>							6 PD	<b>57,236,000</b>	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	34,855,000	34,855,000	34,855,000	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	1 Laporan	38,340,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Kudus  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	17,178,010	17,178,010	17,178,010	Kab. Kudus, Kota Kudus, Demaan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kudus	7 Perangkat Daerah	18,896,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>TOTAL</b>								<b>18,360,542,826</b>	<b>26,810,542,791</b>	<b>31,559,364,791</b>							<b>19,800,408,336</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Melalui Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Dalam implementasi dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023, diperlukan konsistensi dan komitmen OPD dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik, saran untuk dapat membantu penyempurnaannya di masa mendatang. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2023 ini dapat di laksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta berguna untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kudus, September 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,

  
**DWI YUSI SASEPTI, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 19740919 199303 2 002